



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKOT DAERAH
2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA



DPPKB PURWAKARTA

DPPKB KAB.PURWAKARTA

083804666970





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Purnawarman Barat Nomor : 5/9, Sindangkasih, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kode Pos 41112

Telpon: (0264) 201006, Faximile : (0264) 201006

Laman : //dppkb.purwakartakab.go.id, Pos e-l : dppkb.purwakarta@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : kpb/03.01Kep. DPPKB/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG
PEMEBETUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

+

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968, Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 200 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional Khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLN Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen
 12. Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 13. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (RKPD).
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2024

16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**



H.YAYAT HIDAYAT,S.Sos

NIP. 19700215199703 1 009



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKP Tahun 2025, yang memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025;
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025;
- c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. BAB VII Penutup

- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di
Purwakartapada

4 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,atas rahmat dan karunia-Nya,kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Laporan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis Kinerja dan sebagai panduan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 yang merupakan penjabaran program pembangunan daerah khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta, sehingga tahapan-tahapan pembangunan Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dari pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran secara efektif dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian data maupun kegiatan.

Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan masukan untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut sehingga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dapat tersusun secara optimal dan berkualitas.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada anggota tim penyusun Rencana Kerja (Renja) yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini.mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, Kewenangan dan program serta kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2025.

Purwakarta, Juli 25-2024

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.2.LANDASAN HUKUM.....	3
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4.SISTEM MATIKA PENULISAN.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU	12
2.1.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3.ISU-ISU PENTING PENYELANGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	20
2.4.RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	21
2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA.....	32
3.1.TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	32
3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	38
3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN.....	39
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA.....	50
BAB V PENUTUP.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara

dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (Renja) selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 – 2026.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja; dan
6. Penetapan Renja.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara Adapun Tugas rinci.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (Dua) Sub bagian, 3 (empat) Kepala Bidang dan 11 Jabatan Fungsional Yaitu ;

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana;
3. Kepala Bidang Pembangunan Ketahananana Keluarga; dan

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah I
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Wilayah II
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah III
5. Jabatan Fungsional

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 202. tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202. Nomor ...);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 202. Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk

komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2025;
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 1 (satu) Urusan Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan KB. Sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan 4 (Empat) Program yang dijabarkan dalam 44 (Empat Puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.22.063.291.753,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam puluh tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah.)

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2023, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

Kode	Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	A	B	A	128%	B	A	128%
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	80,1	80,2	80	80,2	113%	80,1	240,5	300,25%
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4	12	12	12	100%	4	36	900%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	34	34	34	34	100%	34	102	300%
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1	1	1	100%	4	6	150,00%
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan	5	12	7	7	100%	5	19	380,00%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8	12	3	3	100%	8	23	287,50%
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	12	19	19	100%	4	35	875,00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7	12	9	9	100%	7	28	400,00%

2.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	2	12	12	12	100%	2	26	1300,00%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Jumlah Unit	3	2	2	2	100%	3	7	233.33%
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah jasa surat menyurat	1	1	3	3	100%	1	5	500,00%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	5	3	3	100%	5	13	240,00%
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114	106	106	106	100%	114	356	312,28%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1	2	2	2	100%	1	5	500,00%
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36	36	36	36	100%	36	108	300,00%
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk									
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupate	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	1	2	2	2	100%	1	5	500,00%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
2.14.02.2.02.03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Terlaksananya Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	1	4	1	1	100%	1	6	600,00%
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisytem informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1	4	4	4	100%	1	9	900,00%

2.14.02.2.02.13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan	2	4	2	2	100%	2	8	400.00%
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1	2	1	1	100%	1	4	400.00%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1	2	2	2	100%	1	5	500.00%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	9	5	5	5	100%	9	19	211.11%
22.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	12	12	12	12	100%	12	36	300.00%
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	12	12	12	100%	12	36	300.00%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	12	12	12	12	100%	12	36	300.00%
22.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota									
2.14.03.2.03.01	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	105	105	105	105	100%	105	315	300.00%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Terlaksananya peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	7	2	7	7	100%	7	16	228.57%
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	500	500	500	500	100%	500	1.500	300.00%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	4	4	4	100%	1	9	900.00%
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	2	2	2	2	100%	2	6	300.00%
22.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
2.14.03.2.04.11	Penguatan Peran serta Oraginasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja	6	2	2	2	100%	6	10	166.67%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terlaksananya pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	3	2	3	3	100%	3	8	266.67%
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	5	5	5	100%	30	40	133.33%
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	3	3	3	100%	5	11	220.00%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3340	3340	3340	3340	100%	3340	10.020	0.30%
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi masyarakat dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pendayagunaan mitra kerja dan organisasi masyarakat	4	1	8	8	100%	4	13	325.00%
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	3	3	3	3	100%	3	9	300.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kerangka analisis kinerja pelayanan terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui, yaitu data internal dan eksternal. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Tabel T-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	SPM/standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)	Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn + n)	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Opini	B	B	A	-	A	A	-	-	Sudah tercapai
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			Presentase	1.69	1.69%	1,35 %	-	1.69	1.69%	-	-	Sudah tercapai
3	TFR (Angka Kelahiran Total)			Presentase	2.35	2.35	2,33 %	-	2.35	2.35	-	-	Sudah tercapai
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			Presentase	100 %	100%	100 %	-	100 %	100%	-	-	Sudah tercapai
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga			Presentase	2.35%	2.35%	2,33 %	-	2.35%	2.35%	-	-	Sudah tercapai
6	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE			Presentase	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-	-	Sudah tercapai
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)			Presentase	65.6%	65.6%	70 %	-	65.6%	65.6%	-	-	Sudah tercapai
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			Presentase	13,11%	13,1%	8 %	-	13,11%	13,1%	-	-	Sudah tercapai
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			Presentase	100%	100%	100 %	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
10	Ratio Akseptor KB			Presentase	1;1,52	1;1,36	75,49 %	-	1;1,52	1;1,36	-	-	Sudah tercapai
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49			Presentase	65.6%	73.3%	70 %	-	65.6%	73.3%	-	-	Sudah tercapai
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			Presentase	25.7%	25.7%	24,4 %	-	25.7%	25.7%	-	-	Sudah tercapai
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			Presentase	13,11%	13,11%	8 %	-	13,11%	13,11%	-	-	Sudah tercapai
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Presentase	19.8%	19.8%	25,01 %	-	19.8%	19.8%	-	-	Sudah tercapai
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			Presentase	92.03%		10,43 %	-	92.03%		-	-	Sudah tercapai
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			Presentase	100%	100%	95 %	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB			Presentase	76.55%	89.17%	65 %	-	76.55%	89.17%	-	-	Sudah tercapai
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB			Presentase	63.64%	80.18%	11,30 %	-	63.64%	80.18%	-	-	Sudah tercapai
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			Presentase	23.53%	23.53%	30,01 %	-	23.53%	23.53%	-	-	Sudah tercapai

20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa			Presentase	100%	100%	535,30%	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk			Presentase	100%	1000%	100 %	-	100%	1000%	-	-	Sudah tercapai
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri			Presentase	71.35%	81.4%	30 %	-	71.35%	81.4%	-	-	Sudah tercapai
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan			Presentase	1:1	1:1	1:1	-	1:1	1:1	-	-	Sudah tercapai
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat			Presentase	100%	100%	100 %	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BRJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan			Presentase	37.62%	42.52%	127,98 %	-	37.62%	42.52%	-	-	Sudah tercapai
26	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Presentase	40%	40%	50 %	-	-	-	-	-	Sudah tercapai
27	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa			Presentase	100%	100%	100 %	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
28	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)			Presentase	0%	0%	0 %	-	0%	0%	-	-	Sudah tercapai
29	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga			Presentase	100%	100%	100 %	-	100%	100%	-	-	Sudah tercapai
30	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			Presentase	25.59%	30.32%	60 %	-	25.59%	30.32%	-	-	Sudah tercapai
31	Rata-rata usia kawin pertama wanita			Presentase	19.3%	20.1%	19,1 %	-	19.3%	20.1%	-	-	Sudah tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
3. Kurangnya memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
4. Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk .
5. Peningkatan dalam partisipasi KB baru.

6. Masih tingginya keluarga pra sejahtera.
7. Usia Kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
8. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi:
9. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
10. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal Renja

Hasil review terhadap rancangan awal Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal Renja tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.967.061.191,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Purwakarta	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran		20.967.061.191,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				20.967.061.191,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.967.061.191,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.578.904.864,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.578.904.864,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	33.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	2 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	6.021.904.864,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah ;Presentase pemenuhan penunjang pelayanan	100%	6.021.904.864,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.012.904.864,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34 Orang/bulan	6.012.904.864,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Cakupan SAKIP Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	1 Laporan	9.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah ;Presentase pemenuhan penunjang pelayanan	100%	12.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	12.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Laporan	12.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 persen	125.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen	125.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	75.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Orang	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	339.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	339.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	1 Paket	19.000.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	15.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 laporan	15.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	180.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	180.000.000,00	

	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Mebel		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	3 Unit	30.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Unit	50.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	524.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	524.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantora	1 Laporan	4.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	420.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantora	100%	344.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	344.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	60.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	70.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	114.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	1 Unit	114.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Uni	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Uni	50.000.000,00	

								Tingkat Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				290.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		290.000.000,00	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	80,00 %	105.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80,00 %	105.000.000,00	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	1 Dokumen	25.000.000,00	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	30.000.000,00	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Kegiatan	30.000.000,00	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	50.000.000,00	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Kegiatan	50.000.000,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	80,00 persen	185.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	80,00 persen	185.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 laporan	50.000.000,00	
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000,00	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	25.000.000,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	25.000.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			1 Laporan	25.000.000,00	

	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Laporan	60.000.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	1 Laporan	60.000.000,00	
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	25.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			-	7.709.695.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	7.709.695.000,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62%	43.600.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	70,62%	43.600.000,00	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 unit	70.000.000,00	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB akti	2 unit	70.000.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	573.600.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 laporan	573.600.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB akti	70,61%	2.389.360.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	70,61%	2.389.360.000,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 unit	50.000.000,00	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	1 unit	50.000.000,00	

								(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3000 Orang	200.0000.0000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	3000 Orang	200.0000.0000	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	753.360.000,00	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 organisasi	753.360.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 laporan	1.386.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 laporan	1.386.000.000,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62%	985.000,003.401	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	70,62%	985.000,003.401	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	108.900.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Laporan	108.900.000,00	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4000 orang	3.070.085.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4000 orang	3.070.085.000,00	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	1 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	73.000.000,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 unit	73.000.000,00	

	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	100.000.000,00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	100.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62%	1.174.750.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			70,62%	1.174.750.000,00	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	50.000.000,00	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	1 Organisasi	50.000.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kampung	1.124.750.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	3 Kampung	1.124.750.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.388.461.327,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		5.388.461.327,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	100%	5.238.400.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100%	5.238.400.000,00	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	300.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Presentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	1 Unit	300.000.000,00	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	100.000.000,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	1 Laporan	100.000.000,00	

								Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	3000 Orang	4.838.400.000,00		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3000 Orang	4.838.400.000,00	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Presentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%	150.061.327,00		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100%	150.061.327,00	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	100.000.000,00		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 laporan	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	50.061.327,00		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Organisasi	50.061.327,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui dua macam perencanaan yaitu Bottom Up dan Top Down. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD:

Tabel T-C.32
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
 Kabupaten Purwakarta

No	Usulan	Lokasi	Masalah	Indikator	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							Tidak ada Usulan dari hasil musrembang
2							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mendukung Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang”.

Sedangkan dari **6 Agenda Pembangunan Nasional** yakni:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;

5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya berfokus pada **Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang**, Penjabaran dari Agenda Prioritas Pembangunan Nasional diatas yakni :

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian visi, misi dan janji Presiden 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik, maka ditetapkan ukuran pencapaian Program dan Kegiatan Prioritas ke dalam Sasaran Strategis yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Menurunnya TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024,
- b) Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024,
- c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 8,6 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024, (4)
Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-

19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024, (5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024,

- d) Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 pada tahun 2024.

3.2. Arah Kebijakan Nasional

a) Arah Kebijakan Pengendalian penduduk

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional (PN) melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah: Pertama, menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- a) Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai

dasar perencanaan pembangunan daerah,

- b) Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk,
- c) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk, Kedua, peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan,
- d) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi,

b.) Arah Kebijakan Keluarga Berencana

- c.)** Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi,
- a) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan

- KB Pasca Persalinan (KB-PP),
- b) Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan,
 - c) Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting),
 - d) peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten dan kota,
 - e) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja,
 - f) Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB.

Ketiga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi:

d.) Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan keluarga

serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi:

- a) Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK),
- b) Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja,
- c) Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah,
- d) Pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,
- e) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia.

e.) Arah Kebijakan advokasi dan penggerakan Program KKBPK

meningkatkan advokasi dan penggerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- a) Peningkatan advokasi Program KKBPk berbasis biaya dan manfaat serta pendekatan sosial kultural,,
- b) Peningkatan promosi Program KKBPk (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah
- c) Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPk dan penyebaran materi/informasi terkini.

f.) Arah Kebijakan sistem informasi keluarga yang terintegrasi,

memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

- a) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPk berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah,
- b) Pengembangan smart technology untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPk

3.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat

SASARAN : a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana

3.4. Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah OPD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yaitu “**Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah**” yang kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran kinerja.
- b. Proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian target yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam

prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan adalah tujuan bersama, Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja.

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						20.967.061.191,00							25.008.000.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.967.061.191,00							25.008.000.000,00			
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					20.967.061.191,00							25.008.000.000,00			
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A			-	7.578.904.864,00							-	8.978.000.000,00	
	2.14.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai ketentuan	4 Dokumen			4 Dokumen	33.000.000,00			-	10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	100 persen	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang sesuai ketentuan	1 laporan 34 orang			1 laporan 34 orang	6.021.904.864,00			-	-	-	100 persen	6.510.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan			34 Orang/bulan	6.012.904.864,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DANA PERIMBANGAN	-	-	-	34 Orang/bulan	6.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase pemenuhan penunjang pelayanan	100 persen			100 persen	12.000.000,00			-	-	-	100 persen	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Sesuai Ketentuan	1 Paket 4 orang			1 Paket 2 orang	125.000.000,00			-	-	-	100 persen	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	75.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			2 Orang	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Orang	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 paket 14 Laporan			7 paket 14 Laporan	339.000.000,00			-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	100 persen	390.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	8 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	19.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 unit			19 unit	180.000.000,00			-	-	-	100 persen	320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	-	-	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			6 Unit	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor		25 laporan			25 laporan	524.000.000,00			-	-	-	100 persen	623.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	420.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Kondisi Baik	120 unit			67 unit	344.000.000,00			-	-	-	100 persen	875.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit			5 Unit	60.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 Unit			14 Unit	70.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	114 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit			46 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	114.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan 2. Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100persen			100persen	290.000.000,00						-	490.000.000,00	

2.14.02.2.01	Memadukan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen		100 persen	80,00 persen	105.000.000,00			-	-	-	100 persen	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan			1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sema Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana														
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Kegiatan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100 persen		100 persen	80,00 persen	185.000.000,00			-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	100 persen	290.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	3 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	2 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62 persen			70,62 persen	7.709.695.000,00						-	9.690.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 persen			100 persen	743.600.000,00			-	-	-	70,61 persen	900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit			2 Unit	70.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan			1 Laporan	573.600.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	1 Laporan	600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	100 persen			100 persen	2.389.360.000,00			-		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	70,62 persen	2.760.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														

		Jumlah Sarana Pendukung Operasional/PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2.Peningka lan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	% Orang			3000 Orang	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	% Orang	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi			1 Organisasi	753.360.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2.Peningka lan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Organisasi	800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan			1 Laporan	1.386.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.Peningka lan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	100 persen			100 persen	3.401.985.000,00			-	2.Peningka lan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	70,62 per se n	4.630.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	105 Laporan			105 Laporan	108.900.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2.Peningka lan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	105 Laporan	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7 Orang			4000 Orang	3.070.085.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-	7 Orang	4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit			1 Unit	73.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	-	-	-	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak															
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	100 persen			100 persen	1.174.750.000,00			-	-	-	70,62 persen	1.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB															
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	1 Organisasi			1 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Organisasi	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kampung			3 Kampung	1.124.750.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	3 Kampung	1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase partisipasi Kelompok tribuna dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	100 persen			100 persen	5.388.461.327,00						-	5.850.000.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kelahiran dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	100 persen			100 persen	5.238.400.000,00			-	-	-	100 persen	5.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															

		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-	1 Unit	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)														
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA)														
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	% Orang			3000 Orang	4.838.400.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-	% Orang	5.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Item Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan 1 organisasi			1 Laporan 1 organisasi	150.061.327,00			-	-	-	100 persen	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi			1 Organisasi	50.061.327,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Organisasi		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
J U M L A H										20.967.061.191,00					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel T-C 34, sebagai berikut :

Tabel T-C 34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						20.967.061.191,00							25.008.000.000,00		
2		URUSANPEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.967.061.191,00								25.008.000.000,00		
	2.14	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					20.967.061.191,00								25.008.000.000,00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-			-	7.578.904.864,00						-	8.978.000.000,00		
	2.14.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemerluhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen			100 persen	33.000.000,00				10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	100 persen	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATA N - ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N - ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 10 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATA N - ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemerluhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen			100 persen	6.021.904.864,00						100 persen	6.510.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan			34 Orang/bulan	6.012.904.864,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DANA PERIMBANGAN	-	-	-	34 Orang/bulan	6.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah: Persentase pemenuhan penunjang pelayanan		100 persen			100 persen	12.000.000,00			-	-	-	100 persen	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan SAKIP Perangkat Daerah: Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		100 persen			100 persen	125.000.000,00			-	-	-	100 persen	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	75.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			2 Orang	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Orang	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah: Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran		100 persen			100 persen	339.000.000,00			-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	100 persen	390.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	4 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	8 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	19.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen				100 persen	180.000.000,00			-	-	-	100 persen	320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	-	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			6 Unit	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen				100 persen	524.000.000,00			-	-	-	100 persen	623.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	420.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 persen			100 persen	344.000.000,00			-	-	-	100 persen	875.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit			5 Unit	60.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 Unit			14 Unit	70.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	114 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit			46 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan RS	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	114.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	490.000.000,00	

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	cakupan <i>Kejasama Penyelenggaraan pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat</i> Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	100 persen			80,00 persen	105.000.000,00			-	-	-	100 persen	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan			1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Semaui Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	1 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana														
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan			1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	1 Kegiatan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan <i>Kejasama Penyelenggaraan pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat</i> Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	100 persen			80,00 persen	185.000.000,00			-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	100 persen	290.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	3 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	2 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-			-	7.709.695.000,00						-	9.690.000.000,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62 perse n		70,60 persen	743.600.000,00			-	-	-	70,61 perse n	900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Distribusi KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit			2 Unit	70.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan			1 Laporan	573.600.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	1 Laporan	600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62 perse n		70,61 persen	2.389.360.000,00			-		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	70,62 perse n	2.760.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
		Jumlah Sarana Pendukung Operasional/ PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	% Orang			3000 Orang	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	% Orang	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi			1 Organisasi	753.360.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Organisasi	800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Pelugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Pelugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan			1 Laporan	1.386.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62 persen			70,61 persen	3.401.985.000,00			-	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	70,62 persen	4.630.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	105 Laporan			105 Laporan	108.900.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	-	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	-	105 Laporan	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7 Orang			4000 Orang	3.070.085.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB, DAK NON FISIK-BOKB-KB-BOK	-	-	-	7 Orang	4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit			1 Unit	73.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-	-	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70,62 persen			70,61 persen	1.174.750.000,00			-	-	-	70,62 persen	1.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	1 Organisasi			1 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Organisasi	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kampung			3 Kampung	1.124.750.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	3 Kampung	1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	5.388.461.327,00						-	5.850.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	100 persen			100 persen	5.238.400.000,00			-	-	-	100 persen	5.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	1 Unit	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	% Orang			3000 Orang	4.838.400.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	DAKNON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	% Orang	5.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase partisipasi kelompok terna dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	100 persen				100 persen	150.061.327,00			-	-	-	100 persen	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi			1 Organisasi	50.061.327,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Sindangkasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Organisasi		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
J U M L A H															20.967.061.191,00		

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana tindaklanjut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 4 program, 16 kegiatan DAN 52 Subkegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 25 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

